

## MOLOR, PROYEK BENDUNGAN JLANTAH DI JATIYOSO KARANGANYAR TAK RAMPUNG TAHUN INI



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/11/bendungan-jlantah.jpg>

### **Isi Berita:**

Solopos.com, KARANGANYAR — Proyek pembangunan Waduk Jlantah di Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, molor dari target dan tak bisa rampung akhir tahun ini. Proyek yang menelan anggaran Rp965 miliar itu kemungkinan rampung pada semester I 2024 mendatang.

Kabid Pelaksana Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Naryo Widodo, mengatakan progres pembangunan bendungan Jlantah sekitar 77,5%. Pembangunan sempat terkendala teknis pondasi yang belum siap. Perbaikan pondasi waktu itu menunggu alat yang masih digunakan pada proyek bendungan di daerah lain.

“Waktu itu kami menunggu alat yang memang hanya ada satu di Indonesia. Tapi sekarang sudah selesai dikerjakan hanya kurang main dam [bendungan utama]. Kemungkinan selesai di semester I tahun 2024,” katanya selepas Sosialisasi Penyusunan Rencana Tindak Darurat Bendungan Jlantah di Pendopo RM Said Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada Rabu (29/11/2023).

Di sisi lain, saat ini masih ada 230 bidang lahan dan bangunan terdampak baik milik warga maupun aset desa yang belum dibayarkan ganti ruginya. Naryo mengatakan belum rampungnya proses pembebasan lahan bukan karena adanya penolakan, melainkan hanya ada masalah di administrasi. Pembangunan Bendungan Jlantah terus dikerjakan dan ditargetkan bisa beroperasi semester I di tahun depan.

Sebelum dioperasikan, pihaknya menyiapkan rencana tindak darurat kondisi abnormal Bendungan Jlantah. Mitigasi bencana ini diperlukan untuk menyelamatkan ribuan jiwa apabila bendungan jebol. Setidaknya ada 6.925 warga di 50 desa di tiga daerah meliputi Karanganyar (1.665 jiwa), Wonogiri (220 jiwa), dan Sukoharjo (5.040 jiwa) bakal terdampak jika Bendungan Jlantah jebol.

“Secara fisik bangunan, Bendungan Jlantah diprediksi bisa bertahan lama, minimal sampai 50 tahun,” kata dia.

Lebih jauh Baryo memaparkan Bendungan Jlantah di bangun di Sungai Jlantah dan Sungai Puri Desa Tlobo dan Desa Karang Sari, Kecamatan Jatiyoso, Karanganyar. Proyek tersebut dikerjakan mulai 2018 sampai 2024. Konstruksi bendungan didesain dengan tinggi 70 meter (dari dasar sungai), panjang puncak 404 meter, lebar puncak 12 meter, dan elevasi puncak bendungan +690 meter.

Bendungan Jlantah akan menjadi bendungan multifungsi yang memberikan manfaat pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi seluas 1.494 hektare (ha). Kemudian sebagai penyedia air baku sebesar 150 liter per detik, reduksi banjir 70,33 meter kubik per detik, serta sebagai sarana pariwisata konservasi air.

“Dalam pengelolaan bendungan Jlantah berpedoman pada tiga pilar yakni keamanan struktur, pemantauan pemeliharaan dan operasi, serta kesiapsiagaan tanggap darurat,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Bendungan Jlantah, akan selesai pada akhir 2023. “Target untuk dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023 mudah-mudahan dapat tercapai,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Minggu (25/6/2023) seperti dilansir Antara.

Bendungan Jlantah merupakan satu dari 13 bendungan yang sedang dibangun Kementerian PUPR di seluruh Tanah Air pada tahun ini. Sebanyak 12 bendungan lainnya adalah Cipanas, Karian, Sepaku Semoi, Keureuto, Rukoh, Tiu Suntuk, Lausimeme, Sidan, Leuwikeris, Temef, Pamukkulu, dan Ameroro.

### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/molor-proyek-bendungan-jlantah-di-jatiyoso-karanganyar-tak-rampung-tahun-ini-1807880>, “Molor, Proyek Bendungan Jlantah di Jatiyoso Karanganyar Tak Rampung Tahun Ini”, tanggal 29 November 2023.

2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/29/bendungan-jlantah-di-karanganyar-ditargetkan-selesai-awal-2024>, “Bendungan Jlantah di Karanganyar Ditargetkan Selesai Awal 2024”, tanggal 29 November 2023.

**Catatan :**

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan;

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*